



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 November 2020

Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Peserta Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020; dan
 3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Peserta Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020;
- di -
tempat

SURAT EDARAN

Nomor 11 Tahun 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN DESK EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA**

Sesuai dengan surat Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/158/PW.03/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2020, bahwa dengan telah diperolehnya daftar unit kerja yang lolos tahapan evaluasi survei *online* Zona Integritas dan dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu Desk Evaluasi Zona Integritas yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 13 November 2020 (lampiran 1), dengan ini kami sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian selama persiapan dan pelaksanaan desk evaluasi tersebut:

1. Pimpinan beserta Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja wajib berada di kantor dan mengikuti desk evaluasi sesuai dengan jadwal evaluasi unit kerja yang bersangkutan.
2. Desk evaluasi akan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting*, dengan *Meeting ID*: 666 968 0199 dan *Passcode*: ZI-KEMENPAN.

3. Jumlah akun yang dapat bergabung dalam aplikasi *zoom meeting* adalah maksimal sebanyak 2 (dua) akun yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) akun untuk unit kerja calon berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai peserta desk evaluasi (Pemapar dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas); serta
 - b. 1 (satu) akun untuk pendamping dari Mahkamah Agung yaitu perwakilan dari Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.
4. Pendamping sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 huruf b di atas adalah sebagai berikut:

No	Nama Pendamping MA	Nomor Telepon	Kelas
1	Edi Yuniadi	+62 813-1904-2632	A
	Bimo Prakoso	+62 811-1797-747	
2	Ferri Taufik Ferdiansyah	+62 813-2260-4098	B
	Arief Purwoko	+62 856-4211-1177	
3	Muhammad Anis	+62 813-4158-2493	C
	Sahreza Harahap	+62 877-7739-6747	
4	Imam Purnomo	+62 813-2841-5200	D
	Virna Prasamia Nugraha	+62 812-9858-2253	
5	Iva Fairouz	+62 813-8895-5543	E
	Amarilldo Rizkia	+62 857-1078-5552	
6	Retno Widuri	+62 812-1876-8730	F
	Andrea Arimurti	+62 877-8517-6036	
7	Tiroi Sisruli Siahaan	+62 811-171-259	G
	Sawiji Suprayitno	+62 822-1186-1566	
8	Dhika Hafizh	+62 812-8096-6484	H
	Desfran Subhan	+62 821-1012-7771	
9	Hendra Basry	+62 812-9584-246	I
	Marwendi Putra	+62 813-7494-4220	
10	Apriyadi Romian Kardono	+62 818-987-606	J
	Sutrisno	+62 811-4805-332	
11	Syarifullah M. Nur	+62 821-2213-7785	K
	Muhammad Huzaifah	+62 813-8674-5521	

5. Peserta (Pemapar dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas) wajib mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*.
6. Durasi pelaksanaan desk evaluasi untuk masing-masing unit kerja adalah 60 (enam puluh) menit, dengan ketentuan:
 - a. pemaparan maksimal 20 (dua puluh) menit; dan
 - b. diskusi/tanya jawab maksimal 40 (empat puluh) menit.

7. Mengingat keterbatasan waktu evaluasi, maka selama kegiatan unit kerja tidak menayangkan *video profile* pembangunan Zona Integritas ataupun tidak menunjukkan yel-yel. *Video profile* dan yel-yel dapat disampaikan melalui video dan diunggah dalam situs web dan akun media sosial masing-masing unit.
8. Pemaparan presentasi dilakukan oleh Pimpinan unit kerja (Ketua/Kepala unit kerja). Dalam hal Ketua/Kepala unit kerja berhalangan dikarenakan hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, dapat digantikan Wakil Ketua/Wakil Kepala unit kerja.
9. Selama presentasi tidak perlu menyampaikan teori pembangunan Zona Integritas, melainkan pemaparan dan penjelasan menekankan pada implementasi nyata pembangunan Zona Integritas dan pencapaiannya pada unit kerja.
10. Pimpinan harus memahami masing-masing tujuan dari pelaksanaan 6 (enam) area pembangunan Zona Integritas sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selama presentasi, Pimpinan mampu menjelaskan keterkaitan antara data dukung yang disampaikan dalam upaya unit kerja untuk mencapai tujuan dari masing-masing 6 (enam) area pembangunan Zona Integritas.
11. Bahan paparan berupa *Ms. PowerPoint* yang minimal memuat informasi sebagaimana tertera pada Lampiran 2.
12. Bahan paparan dan data dukung diunggah pada *googledrive/cloud/onedrive* atau sejenisnya sebelum jadwal evaluasi dari unit kerja yang bersangkutan, kemudian tautannya dikirimkan ke alamat surel rbkunwas@gmail.com. Unit kerja memastikan bahan paparan dan data dukung dapat diakses dan diunduh oleh evaluator Kementerian PANRB (dibuka tautan akses untuk *file-file* dimaksud).
13. Selama evaluasi, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dapat membantu memberikan masukan/tambahan jawaban atas pertanyaan evaluator Kementerian PANRB, dengan catatan setiap jawaban diawali dengan penjelasan dari Pimpinan unit kerja.
14. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta evaluasi menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH).
15. Peserta diharapkan memastikan kondisi jaringan internet dalam keadaan stabil. Unit kerja agar melakukan tes jaringan internet sebelum pelaksanaan evaluasi, dan mengantisipasi kemungkinan adanya pemadaman listrik selama desk evaluasi berlangsung.
16. Peserta wajib memasuki aplikasi *zoom meeting* paling lambat 30 menit sebelum evaluasi dimulai. Apabila peserta terlambat mengikuti kegiatan evaluasi, maka tidak akan menambah/mengubah porsi waktu sebagaimana dijadwalkan.

17. Akun *zoom meeting* peserta evaluasi wajib menggunakan format, sebagai berikut:
 - a. nama unit kerja (disingkat: PT.../PTA.../Dilmiltama/PTTUN..., dst)_nama PIC (contoh: PTJakarta_Fulan);
 - b. apabila format nama tidak sesuai, tidak akan diperkenankan evaluator untuk masuk pada sesi evaluasi.
18. Pada sesi evaluasi, peserta diharapkan untuk menjaga lingkungan sekitar tetap kondusif dan menggunakan fitur *mute microphone*.
19. Demi kelancaran komunikasi antara peserta dan evaluator, maka dianjurkan agar desk evaluasi dilakukan di ruangan tertutup dan terbatas (tidak dilaksanakan di aula/ruangan lain yang bergema). Sebaiknya peserta tidak menggunakan *external microphone*, tetapi memanfaatkan *internal microphone* yang tersedia pada laptop/PC.
20. Untuk membantu persiapan menghadapi desk evaluasi, Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memperhatikan berbagai contoh model pertanyaan, tanggapan dan rekomendasi dari evaluator Kementerian PANRB pada saat pelaksanaan desk evaluasi tahun 2019 (Lampiran 3).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung,



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM. Para Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung; dan
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung.

Lampiran 1 Surat Edaran
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 11 Tahun 2020
Tanggal : 4 November 2020

JADWAL KEGIATAN DESK EVALUASI

Kamis, 5 November 2020

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
1		08.00-09.15	Kelas A
2		09.15-10.30	
3		10.30-11.45	
4		13.00-14.15	
5		08.00-09.15	Kelas B
6		09.15-10.30	
7		10.30-11.45	
8		13.00-14.15	
9	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	14.15-15.30	
10	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	15.30-16.45	
11		08.00-09.15	Kelas C
12		09.15-10.30	
13		10.30-11.45	
14	Pengadilan Tinggi Jakarta	13.00-14.15	
15	Pengadilan Agama Bandung	14.15-15.30	
16	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	15.30-16.45	
17		08.00-09.15	Kelas D
18		09.15-10.30	
19		10.30-11.45	
20	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	13.00-14.15	
21	Pengadilan Negeri Pekanbaru	14.15-15.30	
22	Pengadilan Tinggi Semarang	15.30-16.45	
23		08.00-09.15	Kelas E
24		09.15-10.30	
25		10.30-11.45	
26	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	13.00-14.15	
27	Pengadilan Agama Bekasi	14.15-15.30	
28	Mahkamah Syariaah Kuala Simpang	15.30-16.45	
29	Pengadilan Negeri Wates	08.00-09.15	Kelas F
30	Pengadilan Militer Tinggi I Medan	09.15-10.30	
31	Pengadilan Militer Ii-08 Jakarta	10.30-11.45	
32		13.00-14.15	
33		14.15-15.30	
34		15.30-16.45	
35		08.00-09.15	Kelas G
36		09.15-10.30	
37		10.30-11.45	
38	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	13.00-14.15	
39	Pengadilan Negeri Surabaya	14.15-15.30	

40	Pengadilan Negeri Bandung	15.30-16.45	
No	Unit Kerja	Jam	Kelas
41	Pengadilan Negeri Oelarnasi	08.00-09.15	Kelas H
42	Pengadilan Agama Lamongan	09.15-10.30	
43	Pengadilan Tinggi Medan	10.30-11.45	
44		13.00-14.15	
45		14.15-15.30	
46		15.30-16.45	
47		08.00-09.15	Kelas I
48		09.15-10.30	
49		10.30-11.45	
50	Pengadilan Agama Jambi	13.00-14.15	
51	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	14.15-15.30	
52	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	15.30-16.45	
53		08.00-09.15	Kelas J
54		09.15-10.30	
55		10.30-11.45	
56	Pengadilan Negeri Takengon	13.00-14.15	
57	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	14.15-15.30	
58	Pengadilan Agama Karawang	15.30-16.45	
59		08.00-09.15	Kelas K
60		09.15-10.30	
61		10.30-11.45	
62	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	13.00-14.15	
63	Pengadilan Negeri Mojokerto	14.15-15.30	
64	Pengadilan Negeri Indramayu	15.30-16.45	

Jumat, 6 November 2020

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
1	Pengadilan Militer Utama	08.00-09.15	Kelas A
2	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	09.15-10.30	
3		10.30-11.45	
4		13.00-14.15	
5		14.15-15.30	
6		15.30-16.45	
5	Pengadilan Tinggi Ambon	08.00-09.15	Kelas B
6	Pengadilan Agama Martapura	09.15-10.30	
7	Pengadilan Agama Sumbawa Besar	10.30-11.45	
8		13.00-14.15	
9		14.15-15.30	
10		15.30-16.45	
11	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	08.00-09.15	Kelas C
12	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	09.15-10.30	
13	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	10.30-11.45	
14		13.00-14.15	
15		14.15-15.30	
16		15.30-16.45	
17	Pengadilan Agama Gorontalo	08.00-09.15	Kelas D
18	Pengadilan Tinggi Denpasar	09.15-10.30	
19	Pengadilan Agama Indramayu	10.30-11.45	
20		13.00-14.15	
21		14.15-15.30	
22		15.30-16.45	
23		08.00-09.15	Kelas E
24		09.15-10.30	
25		10.30-11.45	
26	Pengadilan Agama Magelang	13.00-14.15	
27	Pengadilan Agama Magetan	14.15-15.30	
28	Pengadilan Agama Muara Bulian	15.30-16.45	
29	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	08.00-09.15	Kelas F
30	Pengadilan Militer III-13 Madiun	09.15-10.30	
31	Pengadilan Agama Batam	10.30-11.45	
32	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	13.00-14.15	
33	Pengadilan Negeri Tangerang	14.15-15.30	
34	Pengadilan Negeri Sampit	15.30-16.45	
35	Pengadilan Agama Makassar	08.00-09.15	Kelas G
36	Pengadilan Agama Banjar Baru	09.15-10.30	
37	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	10.30-11.45	
38	Pengadilan Negeri Bogor	13.00-14.15	
39	Pengadilan Negeri Yogyakarta	14.15-15.30	
40	Pengadilan Negeri Surakarta	15.30-16.45	
41	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	08.00-09.15	Kelas H
42	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	09.15-10.30	

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
43	Pengadilan Agama Semarang	10.30-11.45	Kelas H
44	Pengadilan Negeri Muara Enim	13.00-14.15	
45	Pengadilan Agama Pekanbaru	14.15-15.30	
46	Pengadilan Agama Blitar	15.30-16.45	
47	Pengadilan Negeri Gianyar	08.00-09.15	Kelas I
48	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	09.15-10.30	
49	Pengadilan Agama Jakarta Timur	10.30-11.45	
50		13.00-14.15	
51		14.15-15.30	
52	Pengadilan Negeri Martapura	15.30-16.45	
53		08.00-09.15	Kelas J
54		09.15-10.30	
55		10.30-11.45	
56	Pengadilan Negeri Sungai Liat	13.00-14.15	
57	Pengadilan Negeri Tais	14.15-15.30	
58	Pengadilan Agama Cianjur	15.30-16.45	
59	Pengadilan Negeri Selong	08.00-09.15	Kelas K
60	Pengadilan Agama Mungkid	09.15-10.30	
61	Pengadilan Agama Pacitan	10.30-11.45	
62	Pengadilan Agama Palangkaraya	13.00-14.15	
63	Pengadilan Negeri Singkawang	14.15-15.30	
64		15.30-16.45	

Senin, 9 November 2020

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
1	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	08.00-09.00	Kelas A
2	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	09.00-10.00	
3	Pengadilan Tinggi Palembang	10.00-11.00	
4	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	11.00-12.00	
5	Pengadilan Agama Pati	13.00-14.00	
6	Pengadilan Agama Soe	08.00-09.00	Kelas B
7	Pengadilan Tinggi Agama Manado	09.00-10.00	
8	Pengadilan Agama Wonogiri	10.00-11.00	
9	Pengadilan Negeri Kotamobagu	11.00-12.00	
10	Pengadilan Negeri Jombang	13.00-14.00	
11	Mahkamah Syariah Jantho	14.00-15.00	
12	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	08.00-09.00	Kelas C
13	Pengadilan Tinggi Agama Palu	09.00-10.00	
14	Pengadilan Agama Ambon	10.00-11.00	
15		11.00-12.00	
16	Pengadilan Agama Tebo	13.00-14.00	
17	Pengadilan Agama Selayar	14.00-15.00	
18	Pengadilan Agama Kraksaan	15.00-16.00	Kelas D
19	Pengadilan Agama Kota Madya Palu	08.00-09.00	
20	Pengadilan Agama Tilamuta	09.00-10.00	
21	Pengadilan Agama Tondano	10.00-11.00	
22	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	11.00-12.00	
23	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	13.00-14.00	
24	Pengadilan Negeri Kalianda	14.00-15.00	
25	Pengadilan Agama Sragen	15.00-16.00	Kelas E
26	Pengadilan Agama Donggala	08.00-09.00	
27	Pengadilan Agama Bangli	09.00-10.00	
28	Pengadilan Agama Kolaka	10.00-11.00	
29	Pengadilan Agama Pelabuhan	11.00-12.00	
30	Pengadilan Negeri Arga Makmur	13.00-14.00	
31	Pengadilan Tinggi Pontianak	14.00-15.00	
32	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	15.00-16.00	Kelas F
33	Pengadilan Negeri Maros	08.00-09.00	
34	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	09.00-10.00	
35	Pengadilan Militer III_17 Manado	10.00-11.00	
36	Pengadilan Negeri Unaaha	11.00-12.00	
37	Pengadilan Agama Sumenep	13.00-14.00	
38	Pengadilan Agama Tanggamus	14.00-15.00	
39	Pengadilan Negeri Curup	15.00-16.00	
40	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	16.00-17.00	Kelas G
41	Pengadilan Negeri Larantuka	08.00-09.00	
42	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	09.00-10.00	
43	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	10.00-11.00	
44	Pengadilan Negeri Ternate	11.00-12.00	

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
45	Pengadilan Negeri Tondano	13.00-14.00	Kelas G
46	Pengadilan Negeri Bitung	14.00-15.00	
47	Pengadilan Negeri Cikarang	15.00-16.00	
48	Mahkamah Syariah Banda Aceh	16.00-17.00	
49	Pengadilan Negeri Semarapura	08.00-09.00	Kelas H
50	Pengadilan Tinggi Manado	09.00-10.00	
51	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	10.00-11.00	
52	Pengadilan Negeri Wonosari	11.00-12.00	
53	Pengadilan Tinggi Agama Medan	13.00-14.00	
54	Pengadilan Militer II-10 Semarang	14.00-15.00	
55	Pengadilan Agama Bontang	15.00-16.00	
56	Kejaksaan Negeri Pidie Jaya	08.00-09.00	Kelas I
57	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	09.00-10.00	
58	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	10.00-11.00	
59	Pengadilan Agama Tulang Bawang	11.00-12.00	
60	Pengadilan Negeri Batam	13.00-14.00	
61	Pengadilan Negeri Blangkejeren	14.00-15.00	
62	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	15.00-16.00	
63	Pengadilan Negeri Merauke	08.00-09.00	Kelas J
64	Pengadilan Negeri Pare-Pare	09.00-10.00	
65	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	10.00-11.00	
66	Pengadilan Agama Simalungun	11.00-12.00	
67	Pengadilan Agama Solok	13.00-14.00	
68	Pengadilan Agama Temanggung	14.00-15.00	
69	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	15.00-16.00	
70	Pengadilan Tinggi Makassar	08.00-09.00	Kelas K
71	Pengadilan Agama Merauke	09.00-10.00	
72	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	10.00-11.00	
73	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	11.00-12.00	

Selasa, 10 November 2020

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
1	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	08.00-09.00	Kelas A
2	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	09.00-10.00	
3	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	10.00-11.00	
4	Pengadilan Tinggi Banten	11.00-12.00	
5	Pengadilan Agama Probolinggo	13.00-14.00	
6	Pengadilan Agama Kendari	08.00-09.00	Kelas B
7	Pengadilan Tinggi Jayapura	09.00-10.00	
8	Pengadilan Tinggi Kendari	10.00-11.00	
9	Pengadilan Militer II-09 Bandung	11.00-12.00	
10	Pengadilan Negeri Bengkalis	13.00-14.00	
11	Pengadilan Negeri Calang	14.00-15.00	
12	Pengadilan Agama Fak-Fak	08.00-09.00	Kelas C
13	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	09.00-10.00	
14	Pengadilan Agama Negara	10.00-11.00	
15	Pengadilan Negeri Balikpapan	11.00-12.00	
16	Pengadilan Militer III-15 Kupang	13.00-14.00	
17	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	14.00-15.00	
18	Pengadilan Tinggi Jambi	15.00-16.00	
19	Pengadilan Negeri Tilamuta	08.00-09.00	Kelas D
20	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	09.00-10.00	
21	Pengadilan Agama Ternate	10.00-11.00	
22	Pengadilan Agama Unaaha	11.00-12.00	
23	Pengadilan Negeri Bulukumba	13.00-14.00	
24	Pengadilan Negeri Klaten	14.00-15.00	
25	Mahkamah Syariaah Sabang	15.00-16.00	
26	Pengadilan Negeri Watansoppeng	08.00-09.00	Kelas E
27	Pengadilan Agama Bitung	09.00-10.00	
28	Pengadilan Negeri Kolaka	10.00-11.00	
29	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	11.00-12.00	
30	Pengadilan Agama Pontianak	13.00-14.00	
31	Pengadilan Agama Sawah Lunto	14.00-15.00	
32	Pengadilan Negeri Banjarnegara	15.00-16.00	
33	Pengadilan Tinggi Kupang	08.00-09.00	Kelas F
34	Pengadilan Negeri Raba/Bima	09.00-10.00	
35	Pengadilan Negeri Raha	10.00-11.00	
36	Pengadilan Militer I-05 Pontianak	11.00-12.00	
37	Pengadilan Agama Bima	13.00-14.00	
38	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	14.00-15.00	
39	Pengadilan Agama Sintang	15.00-16.00	
40	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	16.00-17.00	
41	Pengadilan Negeri Barabai	08.00-09.00	Kelas G
42	Pengadilan Negeri Bontang	09.00-10.00	

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
43	Pengadilan Agama Tanjung	10.00-11.00	Kelas G
44	Pengadilan Agama Tanjung Balai	11.00-12.00	
45	Mahkamah Syaria' Kutacane	13.00-14.00	
46	Pengadilan Agama Praya	14.00-15.00	
47	Pengadilan Agama Situbondo	15.00-16.00	
48	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	16.00-17.00	
49	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	08.00-09.00	Kelas H
50	Pengadilan Negeri Tabanan	09.00-10.00	
51	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	10.00-11.00	
52	Pengadilan Agama Rembang	11.00-12.00	
53	Pengadilan Agama Sengeti	13.00-14.00	
54	Pengadilan Negeri Bangkinang	14.00-15.00	
55	Pengadilan Agama Demak	15.00-16.00	
56	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	08.00-09.00	Kelas I
57	Pengadilan Tinggi Palu	09.00-10.00	
58	Pengadilan Militer I-04 Palembang	10.00-11.00	
59	Pengadilan Agama Limboto	11.00-12.00	
60	Pengadilan Agama Lubuk Basung	13.00-14.00	
61	Pengadilan Agama Padang	14.00-15.00	
62	Pengadilan Negeri Pasuruan	15.00-16.00	
63	Pengadilan Negeri Marisa	08.00-09.00	Kelas J
64	Pengadilan Negeri Pelabuhan	09.00-10.00	
65	Pengadilan Agama Kebumen	10.00-11.00	
66	Pengadilan Agama Majalengka	11.00-12.00	
67	Pengadilan Agama Muara Enim	13.00-14.00	
68	Pengadilan Negeri Metro	14.00-15.00	
69	Pengadilan Negeri Demak	15.00-16.00	
70	Pengadilan Agama Manado	08.00-09.00	Kelas K
71	Pengadilan Agama Maros	09.00-10.00	
72	Pengadilan Agama Pamekasan	10.00-11.00	
73	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	11.00-12.00	

Rabu, 11 November 2020

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
1	Pengadilan Tinggi Mataram	08.00-09.00	Kelas A
2	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	09.00-10.00	
3	Pengadilan Militer I-02 Medan	10.00-11.00	
4	Pengadilan Tinggi Agama Banten	11.00-12.00	
5	Pengadilan Agama Tigaraksa	13.00-14.00	
6	Pengadilan Tinggi Samarinda	08.00-09.00	Kelas B
7	Pengadilan Agama Marabahan	09.00-10.00	
8	Pengadilan Negeri Bengkayang	10.00-11.00	
9	Pengadilan Agama Tuban	11.00-12.00	
10	Mahkamah Syariah Aceh	13.00-14.00	
11	Pengadilan Negeri Amurang	14.00-15.00	
12	Pengadilan Tinggi Agama Padang	08.00-09.00	Kelas C
13	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	09.00-10.00	
14	Pengadilan Negeri Kefamenanu	10.00-11.00	
15	Pengadilan Negeri Situbondo	11.00-12.00	
16	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	13.00-14.00	
17	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian	14.00-15.00	
18	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	15.00-16.00	
19	Pengadilan Negeri Biak	08.00-09.00	Kelas D
20	Pengadilan Negeri Amuntai	09.00-10.00	
21	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	10.00-11.00	
22	Pengadilan Negeri Kendal	11.00-12.00	
23	Pengadilan Agama Sanggau	13.00-14.00	
24	Pengadilan Agama Selat Panjang	14.00-15.00	
25	Pengadilan Agama Lahat	15.00-16.00	
26	Pengadilan Tinggi Surabaya	08.00-09.00	Kelas E
27	Pengadilan Negeri Tanjung Selor	09.00-10.00	
28	Pengadilan Agama Balikpapan	10.00-11.00	
29	Pengadilan Agama Kupang	11.00-12.00	
30	Pengadilan Negeri Bintuhan	13.00-14.00	
31	Pengadilan Negeri Kota Agung	14.00-15.00	
32	Pengadilan Negeri Binjai	15.00-16.00	
33	Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta	08.00-09.00	Kelas F
34	Pengadilan Agama Amuntai	09.00-10.00	
35	Pengadilan Agama Tanjung Redeb	10.00-11.00	
36	Pengadilan Agama Tarakan	11.00-12.00	
37	Pengadilan Negeri Bajawa	13.00-14.00	
38	Pengadilan Negeri Bangil	14.00-15.00	
39	Pengadilan Agama Pasuruan	15.00-16.00	
40	Pengadilan Agama Sidikalang	16.00-17.00	
41	Pengadilan Agama Palopo	08.00-09.00	Kelas G
42	Pengadilan Negeri Kendari	09.00-10.00	
43	Pengadilan Negeri Manado	10.00-11.00	
44	Pengadilan Agama Sidoarjo	11.00-12.00	

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
45	Pengadilan Agama Tanjung Pati	13.00-14.00	
46	Mahkamah Syariahyah Langsa	14.00-15.00	
47	Pengadilan Agama Purbalingga	15.00-16.00	
48	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	16.00-17.00	
49	Pengadilan Agama Barabai	08.00-09.00	Kelas H
50	Pengadilan Agama Pangkajene	09.00-10.00	
51	Pengadilan Agama Polewali	10.00-11.00	
52	Pengadilan Agama Rantau	11.00-12.00	
53	Pengadilan Negeri Bantul	13.00-14.00	
54	Pengadilan Negeri Kabanjahe	14.00-15.00	
55	Pengadilan Negeri Purwodadi	15.00-16.00	
56	Pengadilan Agama Buol	08.00-09.00	Kelas I
57	Pengadilan Agama Nunukan	09.00-10.00	
58	Pengadilan Agama Poso	10.00-11.00	
59	Pengadilan Agama Samarinda	11.00-12.00	
60	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	13.00-14.00	
61	Pengadilan Negeri Kayuagung	14.00-15.00	
62	Pengadilan Agama Jakarta Utara	15.00-16.00	
63	Pengadilan Agama Masohi	08.00-09.00	Kelas J
64	Pengadilan Negeri Makassar	09.00-10.00	
65	Pengadilan Negeri Masamba	10.00-11.00	
66	Pengadilan Negeri Poso	11.00-12.00	
67	Pengadilan Agama Tegal	13.00-14.00	
68	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	14.00-15.00	
69	Pengadilan Negeri Pati	15.00-16.00	
70	Pengadilan Agama Muna-Raha	08.00-09.00	Kelas K
71	Pengadilan Negeri Denpasar	09.00-10.00	
72	Pengadilan Negeri Kandangan	10.00-11.00	
73	Pengadilan Agama Purwodadi	11.00-12.00	

Kamis, 12 November 2020

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
1	Pengadilan Agama Tasikmalaya	08.00-09.00	Kelas A
2	Pengadilan Agama Wonosari	09.00-10.00	
3	Pengadilan Negeri Tulungagung	10.00-11.00	
4	Pengadilan Negeri Gresik	11.00-12.00	
5	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	13.00-14.00	
6	Pengadilan Agama Sumber	08.00-09.00	Kelas B
7	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	09.00-10.00	
8	Pengadilan Negeri Tarakan	10.00-11.00	
9	Pengadilan Agama Sukoharjo	11.00-12.00	
10	Pengadilan Agama Tebing Tinggi	13.00-14.00	
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	14.00-15.00	
12	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	08.00-09.00	Kelas C
13	Pengadilan Agama Sentani	09.00-10.00	
14	Pengadilan Negeri Mataram	10.00-11.00	
15	Pengadilan Negeri Negara	11.00-12.00	
16	Pengadilan Agama Wonosobo	13.00-14.00	
17	Pengadilan Agama Banjarnegara	14.00-15.00	
18	Pengadilan Agama Bantul	15.00-16.00	
19	Pengadilan Agama Watampone	08.00-09.00	Kelas D
20	Pengadilan Negeri Samarinda	09.00-10.00	
21	Pengadilan Negeri Sidrap	10.00-11.00	
22	Pengadilan Negeri Sintang	11.00-12.00	
23	Pengadilan Agama Muara Sabak	13.00-14.00	
24	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	14.00-15.00	
25	Pengadilan Agama Tenggaraong	15.00-16.00	
26	Pengadilan Agama Singaraja	08.00-09.00	Kelas E
27	Pengadilan Agama Tual	09.00-10.00	
28	Pengadilan Negeri Sinjai	10.00-11.00	
29	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	11.00-12.00	
30	Pengadilan Agama Yogyakarta	13.00-14.00	
31	Pengadilan Agama Pariaman	14.00-15.00	
32	Pengadilan Agama Tembilahan	15.00-16.00	
33	Pengadilan Agama Bangil	08.00-09.00	Kelas F
34	Pengadilan Agama Banyuwangi	09.00-10.00	
35	Pengadilan Agama Bengkulu	10.00-11.00	
36	Pengadilan Negeri Kuala Simpang	11.00-12.00	
37	Pengadilan Negeri Langsa	13.00-14.00	
38	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	14.00-15.00	
39	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	15.00-16.00	
40	Pengadilan Negeri Palangkaraya	16.00-17.00	
41	Pengadilan Agama Cikarang	08.00-09.00	Kelas G
42	Pengadilan Agama Curup	09.00-10.00	
43	Pengadilan Agama Jakarta Barat	10.00-11.00	
44	Pengadilan Negeri Kepanjen	11.00-12.00	

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
45	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	13.00-14.00	Kelas G
46	Pengadilan Agama Sinjai	14.00-15.00	
47	Pengadilan Negeri Blora	15.00-16.00	
48	Pengadilan Agama Manna	16.00-17.00	
49	Pengadilan Agama Arga Makmur	08.00-09.00	Kelas H
50	Pengadilan Agama Bangkinang	09.00-10.00	
51	Pengadilan Agama Batang	10.00-11.00	
52	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	11.00-12.00	
53	Pengadilan Negeri Magelang	13.00-14.00	
54	Pengadilan Agama Sarolangun	14.00-15.00	
55	Pengadilan Negeri Rote Ndao	15.00-16.00	
56	Pengadilan Agama Bogor	08.00-09.00	Kelas I
57	Pengadilan Agama Dabo Singkep	09.00-10.00	
58	Pengadilan Agama Kayu Agung	10.00-11.00	
59	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	11.00-12.00	
60	Pengadilan Negeri Malang	13.00-14.00	
61	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	14.00-15.00	
62	Pengadilan Agama Pekalongan	15.00-16.00	
63	Pengadilan Agama Bengkayang	08.00-09.00	Kelas J
64	Pengadilan Agama Bondowoso	09.00-10.00	
65	Pengadilan Agama Brebes	10.00-11.00	
66	Pengadilan Negeri Padang	11.00-12.00	
67	Pengadilan Negeri Palembang	13.00-14.00	
68	Pengadilan Negeri Kotabumi	14.00-15.00	
69	Pengadilan Agama Purwakarta	15.00-16.00	
70	Pengadilan Agama Bengkalis	08.00-09.00	Kelas K
71	Pengadilan Agama Bojonegoro	09.00-10.00	
72	Pengadilan Agama Boyolali	10.00-11.00	
73	Pengadilan Negeri Mempawah	11.00-12.00	

Jumat, 13 November 2020

No	Unit Kerja	Jam	Kelas
1	Pengadilan Agama Pemalang	08.00-09.00	Kelas A
2	Pengadilan Agama Wates	09.00-10.00	
3	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	10.00-11.00	
4	Pengadilan Negeri Temanggung	11.00-12.00	
5	Pengadilan Negeri Tegal	13.00-14.00	
6	Pengadilan Agama Jember	08.00-09.00	Kelas B
7	Pengadilan Agama Kisaran	09.00-10.00	
8	Pengadilan Agama Klaten	10.00-11.00	
9	Pengadilan Negeri Bojonegoro	11.00-12.00	
10	Pengadilan Negeri Payakumbuh	13.00-14.00	
11	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	14.00-15.00	
12	Pengadilan Negeri Praya	08.00-09.00	Kelas C
13	Pengadilan Agama Jepara	09.00-10.00	
14	Pengadilan Agama Ketapang	10.00-11.00	
15	Pengadilan Agama Kota Madya Madiun	11.00-12.00	
16	Pengadilan Negeri Pontianak	13.00-14.00	
17	Pengadilan Negeri Ranai	14.00-15.00	
18	Pengadilan Agama Ciamis	15.00-16.00	
19	Pengadilan Agama Kabanjahe	08.00-09.00	Kelas D
20	Pengadilan Agama Karang Anyar	09.00-10.00	
21	Pengadilan Agama Kota Banjar	10.00-11.00	
22	Pengadilan Agama Kota Madya Malang	11.00-12.00	
23	Pengadilan Negeri Prabumulih	13.00-14.00	
24	Pengadilan Negeri Sibolga	14.00-15.00	
25	Pengadilan Agama Pematang Siantar	15.00-16.00	
26	Pengadilan Agama Pare-Pare	08.00-09.00	Kelas E
27	Pengadilan Agama Kendal	09.00-10.00	
28	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	10.00-11.00	
29	Pengadilan Agama Maninjau	11.00-12.00	
30	Pengadilan Negeri Purwokerto	13.00-14.00	
31	Pengadilan Negeri Sambas	14.00-15.00	
32	Pengadilan Negeri Pelalawan	15.00-16.00	
33	Pengadilan Negeri Bale Bandung	08.00-09.00	Kelas F
34	Pengadilan Agama Kudus	09.00-10.00	
35	Pengadilan Agama Lumajang	10.00-11.00	
36	Pengadilan Agama Medan	11.00-12.00	
37	Pengadilan Negeri Purworejo	13.00-14.00	
38	Pengadilan Negeri Stanat	14.00-15.00	
39	Pengadilan Agama Depok	15.00-16.00	
40		16.00-17.00	
41	Pengadilan Negeri Luwuk	08.00-09.00	Kelas G
42		09.00-10.00	
43		10.00-11.00	

Lampiran 2 Surat Edaran
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 11 Tahun 2020
Tanggal : 4 November 2020

KETENTUAN BAHAN PEMAPARAN

I. *Progress reform* pada 6 area perubahan (kondisi *before-after*)

II. Sasaran dalam setiap Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas:

1. Manajemen Perubahan

- a) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja
- b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
- c) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

2. Penataan Tatalaksana

- a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di unit kerja
- b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di unit kerja
- c) Meningkatnya kinerja di unit kerja

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM
- b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
- c) Meningkatnya disiplin SDM
- d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM
- e) Meningkatnya profesionalisme SDM

4. Akuntabilitas

- a) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
- b) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

5. Pengawasan

- a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
- b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara
- c) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

6. Pelayanan Publik

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
- b) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah
- c) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

III. Identifikasi dan mitigasi risiko integritas dalam pelaksanaan pelayanan ada unit kerja

IV. Inovasi pada sektor pelayanan, kinerja, dan penguatan integritas untuk mencegah KKN.

Lampiran 3 Surat Edaran
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 11 Tahun 2020
Tanggal : 4 November 2020

CONTOH PERTANYAAN, TANGGAPAN DAN INPUT
EVALUATOR KEMENTERIAN PANRB

1. Apa perbedaan role model dan agent perubahan? Apakah kriteria masing-masing? Role model yaitu Pimpinan unit kerja yang menguasai semua bidang, sedangkan agen perubahan salah satu tujuannya adalah untuk memotivasi pegawai lain.
2. Predikat role model melekat pada Pimpinan, sedangkan agen perubahan butuh penetapan (melalui SK). Karenanya dalam hal agen perubahan harus ada dasar hukum yang memuat kriteria seorang agen perubahan pada unit kerja. Agen perubahan harus memiliki target. Pergantian tidak selalu berkala. Cth: pemilihan baru saat target tercapai, atau saat ada kompetensi baru.
3. Apa yang direncanakan pada awal pembangunan ZI yang membawa pada keberhasilan pembangunan ZI ini ? Sebutkan contoh implementasi nyata yang dilakukan pengadilan untuk merubah budaya kerja dan merubah pola pikir warga pengadilan dan Pimpinan menjadi teladan bagi jajarannya.
4. Identifikasi kendala dalam proses pembangunan ZI. Identifikasi kendala dari internal maupun eksternal unit kerja. (Cth : penjelasan kendala dari sisi anggaran unit kerja, kendala dari SDMnya, kendala dari masyarakat, dll). Apa langkah nyata yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
5. Kertas kerja pembangunan ZI unit kerja yang memuat target dan implementasi yang dilakukan untuk mencapai target. Bagaimana monev atas realisasi capaian kertas kerja?
6. Internalisasi ZI dilakukan di semua level, termasuk lingkungan sekitar, juru parkir, petugas kantin dan tenaga kebersihan. Internalisasi untuk membangun kesamaan persepsi/visi antara warga di lingkungan pengadilan.
7. Evaluasi atas dampak pemanfaatan banner dalam penyampaian informasi publik/internalisasi.
8. Dalam penataan tata laksana: inovasi internal harus sudah disusun SOP. Sebaiknya ada SOP spesifik yang mengatur internal kantor, sehingga dimungkinkan untuk melakukan modifikasi atas SOP dari pusat dengan menyesuaikan kebutuhan lokal unit kerja.
9. Untuk optimalisasi penggunaan media sosialisasi pembangunan ZI pada unit kerja, seperti penyampaian informasi melalui spanduk ataupun banner harus memperhatikan tata letak media-media tersebut pada tempat yang sesuai kebutuhan. Publikasi informasi-informasi umum/terbuka pada area publik,

website, dan medsos. Sedangkan media yang berhubungan dengan internalisasi seperti dorongan untuk motivasi kerja pegawai, dapat diletakkan di ruangan kerja.

10. Media komunikasi: website, medsos, dipantau followers, yang like, dan diupdate terus. Boleh dilakukan modifikasi selama tidak melanggar ketentuan, contohnya mempublikasikan jadwal sidang di laman awal website. Menyiarkan berita-berita yang positif/capaian unit kerja pada media-media telekomunikasi.
11. Perhatikan konten medsos. Posisikan diri sebagai pengguna. Apa yang kira-kira yang ingin diketahui masyarakat terlebih dahulu? Agar dipermudahkan dalam pencarian informasi publik.
12. Website menampilkan informasi-informasi yang ingin diketahui oleh stakeholders. Identifikasi siapa stakeholdersnya, kalau pengadilan tingkat banding adalah pengadilan tingkat pertama. Berarti apa informasi yang dibutuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, contohnya prosedur, berita tetap dapat dimuat tetapi bisa diletakkan di layar kedua.
13. Bagaimana respon Aparatur terhadap inovasi yang dilakukan unit kerja. Apakah ada resistensi? Bagaimana cara untuk menghilangkan resistensi Aparatur terhadap perubahan/inovasi?
14. Know your issue, menjadi dasar dalam perencanaan/penyusunan dan pembuatan inovasi. Inovasi dibuat untuk menjawab permasalahan unit kerja.
15. Rekomendasi untuk menerapkan sistem knowing your. Knowing your employee dapat dilakukan dengan melihat gaya hidup SDM, karakteristiknya SDM, seperti cara pandang dan sikapnya apakah kesukuan atau tidak? Gaya hidup sederhana atau berlebihan/mewah?
16. Evaluasi capaian unit kerja. Bagaimanakah korelasi antara jumlah SDM dengan kinerja organisasi? Perhatikan ilustrasi keadaan pada saat SDM kurang dan beban kerja tinggi, tetapi tidak dimungkinkan untuk penambahan pegawai. Maka yang dibutuhkan adalah pengembangan kompetensi pegawai. Apa saja jenis-jenis pelatihan/bintek/sosialisasi/ coaching/mentoring untuk pengembangan kompetensi pegawai yang tersedia pada unit kerja?
17. Pada unit kerja perlu disusun matriks training needs analysis untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/bintek/sosialisasi/coaching/mentoring dari masing-masing pemangku jabatan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM, dan juga prioritasnya.
18. Apakah indikator capaian kinerja pengadilan? Lihat IKU Pengadilan
19. Apa alat ukur/indikator capaian kinerja dari Pengadilan Tingkat Banding?
20. Revisi Perjanjian Kinerja (agar dipenuhi). Perjanjian kinerja dilakukan secara berjenjang.
21. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan pengadilan, bagaimana capaiannya sampai dengan saat ini? Contoh jawaban: hasil IKM, capaian unit kerja pada laporan kinerja.

22. Bagaimana proses menerapkan SPIP pada unit kerja? Seberapa efektif SPIP pada pengadilan? Selalu memantau kinerja secara peringkat nasional melalui SIPP.
23. Saran untuk menggunakan peringkat/keadaan perkara SPIP terhadap penilaian kinerja.
24. Bagaimana sistem sterilisasi atas ruangan kerja Pejabat/Pegawai (selain area publik) dari akses pihak masyarakat umum?
25. Jelaskan implementasi untuk pengendalian gratifikasi pada pengadilan. Cth : pengawasan melekat (baik di dalam maupun di luar jam kerja), fasilitas-fasilitas penunjang sterilisasi ruang kerja/back office, ruang tamu terbuka, unit pengendali gratifikasi (UPG) ada SKnya.
26. Perlu dilakukan pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada unit kerja.
27. Bagaimana penerapan pengendalian internal (Unit Pengendali Gratifikasi/UPG) pada pengadilan.
28. Apa fungsi UPG? Apa saja kegiatan UPG pada unit kerja? Seefektif apa UPG dalam mengendalikan gratifikasi? Cth kegiatan UPG pada unit kerja lain: bila ada terjadi gratifikasi dari luar biasanya dilaporkan kepada UPG, kemudian bentuk gratifikasi itu difoto dan dipublikasikan secara internal unit kerja, sebagai bentuk pengendalian.
29. Perlu dilakukan pemetaan manajemen resiko dan pemetaan benturan kepentingan, serta mekanisme penanganannya. Cek Permenpan tentang benturan kepentingan. Contoh penanganan benturan kepentingan: tidak boleh merekrut outsourcing yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat/pegawai internal unit kerja.
30. Bagaimana mekanisme membuat tabel/matriks identifikasi resiko.
31. Identifikasi resiko yang terkait gratifikasi, integritas, perilaku korupsi pada unit kerja.
32. Resiko tertinggi apa yang dimiliki pengadilan? Karena hubungannya dengan perkara dan data-data maka salah satunya adalah resiko terkait dengan berkas/dokumen, apa mitigasi risiko yang telah dilakukan? Bagaimana cara mengatasi kendala kehilangan berkas?
33. Secara umum modus-modus apa yang terjadi terkait resiko yang berhubungan dengan praktek KKN antara pengadilan dengan masyarakat/advokat pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama?
34. Bagaimana implementasi Whistle Blowing System (WBS)? Bagaimana penerapannya pada Pengadilan Tingkat Banding di mana banyak interaksi dilakukan bukan dengan masyarakat, tetapi dengan instansi lain atau Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk monev penerapan WBS, bukan semata-mata berdasarkan jumlahnya, upaya apa yang telah dilakukan dalam mencegah kejadian, cara-cara internalisasinya, dll.

35. Bagaimana menghadapi publik pada wilayah lokasi pengadilan yang memiliki budaya yang khas/berbeda.
36. Pada Pengadilan Tingkat Banding, pengawasan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama harus terus berjalan. Namun ada kondisi di mana karena kekhasan wilayah/lokasi maka anggaran sangat kurang dalam perjalan. Apa strategi untuk mengatasinya?
37. Komitmen Pimpinan dan jajaran dan lingkungan sekitar, dengan memberikan dan memperhatikan kemudahan pelayanan, masyarakat memperoleh hak-haknya dan masyarakat memperoleh informasi mengenai jenis-jenis layanan yang dimiliki unit kerja. Contoh yang telah dilakukan PN adalah dengan membuat baleho di desa-desa dan melalui pelayanan-pelayanan tatap muka langsung kepada masyarakat.
38. Bila terdapat masyarakat yang mengantri pada jam sibuk sehingga baru dapat dilayani di luar jam kerja (jam istirahat/melewati sedikit dari jam pulang kantor). Apakah ada mekanisme pemberian layanan di luar jam kerja? Bagaimana sistem pengawasan dari Atasan kepada Pegawai pemberi layanan?
39. Untuk sistem pemberian kompensasi kepada publik yang menerima layanan di luar jam kerja, apakah hal tersebut mampu mendorong pada efisiensi/efektifitas kinerja?
40. Sering kali ada perubahan court calendar tanpa ada alasan jelas, termasuk perubahan jam sidangnya. Apakah terjadi pada unit kerja setempat, bila iya maka apa solusinya?
41. Apakah setelah ditandatangani oleh para pihak court calendar masih bisa diubah oleh Hakim? Bila perubahan court calendar (jadwal sidang) dikarenakan Hakimnya yang berhalangan, maka bagaimana pemberitahuan kepada para pihak?
42. Bila ada jadwal sidang yang molor maka apa kompensasi yang diberikan kepada para pihak sebagai bentuk tanggung jawab moral dari pengadilan?
43. Perlu dilakukan survei terkait semua jenis layanan pada unit kerja, seperti: layanan PTSP, layanan persidangan, layanan dari Posbakum (Permenpan 14/2017). Setelah itu dilakukan monev atas kekurangan nilai pada hasil survei. Permudah laporan survei untuk membantu Pimpinan membaca hasil survei.
44. Survei IKM sebaiknya dilakukan minimal 6 bulan sekali. Kotak kepuasan publik yang berisikan pilihan tanggapan Tidak Puas/Puas/Sangat Puas hanya memadai dipergunakan untuk monev harian. Saat ada yg tidak puas agar memeriksa dan menindaklanjuti ketidakpuasan masyarakat.
45. Terkait dengan IKM, agar diidentifikasi unsur apa yang memiliki nilai rendah dan dilakukan perbaikan pada unsur-unsur tersebut. Sedangkan untuk unsur yang sudah mendapat nilai baik, dilihat ruang untuk meningkatkan nilainya.